



JEJAK SEJARAH MALUKU TERSELATAN

Stephanus Gerardus Setitit

PT Garuda Indonesia

stevgerard@gmail.com

Abstrak:

Desentralisasi pemerintahan Hindia Belanda memberikan dampak signifikan pada wilayah Maluku Tenggara, yang pada masa itu dikenal sebagai Maluku Terselatan. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi proses desentralisasi, pembentukan struktur pemerintahan lokal, dan pengaruhnya terhadap pengembangan identitas wilayah. Menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif historis, data penelitian diperoleh dari arsip, dokumen resmi, dan literatur pendukung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan desentralisasi memperkuat partisipasi lokal melalui pembentukan Locale Raad, meskipun dihadapkan pada kendala administratif dan sosial. Penetapan Tual sebagai pusat administrasi berperan penting dalam memperkuat identitas regional, namun tantangan seperti keterbatasan sumber daya manusia dan konflik internal menjadi hambatan dalam implementasi kebijakan. Mosi Rakyat Kei pada tahun 1947 menjadi tonggak penting dalam perjuangan masyarakat Kei untuk mendapatkan pengakuan administratif yang lebih luas. Kesimpulannya, desentralisasi memiliki peran penting dalam membentuk identitas Maluku Tenggara, meski masih memerlukan optimalisasi dalam implementasinya.

Kata Kunci: Desentralisasi, Identitas Regional, Maluku Tenggara, Pemerintahan Lokal, Struktur Administrasi, Hindia Belanda

Abstract:

This study examines the historical dynamics of South Maluku within the social, political, and economic contexts during the Dutch East Indies colonial era up to Indonesia's post-independence period. The background of this research focuses on the colonial government's decentralization policy, which introduced the formation of local government structures such as the Locale Raad and its impact on the regional identity of Southeast Maluku. The primary objective of this research is to explore the influence of decentralization on local government structures, social dynamics, and the formation of the Kei community's identity. The research employs a qualitative approach using descriptive-historical and heuristic methods. Data were collected through archival studies, historical literature, interviews, and participatory observation. This approach enables the researcher to identify relational patterns between colonial policies and social developments in Southeast Maluku.

The findings reveal that decentralization policies strengthened local participation through the establishment of the Locale Raad, despite facing administrative and social challenges. The designation of Tual as the administrative center played a crucial role in reinforcing regional identity, though obstacles such as limited human resources and internal conflicts hindered policy implementation. The Mosi Rakyat Kei (Kei People's Motion) of 1947 marked a significant milestone in the Kei community's struggle for broader administrative recognition. This study concludes that decentralization had a significant impact on shaping the identity of Southeast Maluku, though further optimization in its implementation is needed. The implications of this research are relevant for developing more inclusive decentralization policies and contribute to preserving local histories that are often overlooked in national development planning.

Keywords: Decentralization, Regional Identity, Southeast Maluku, Local Government, Administrative Structure, Dutch East Indies

Pendahuluan

Desentralisasi telah menjadi strategi global yang diterapkan untuk mengatasi tantangan dalam pengelolaan wilayah yang beragam secara geografis dan budaya (Jaelani, 2018) (Mulia, Hariadi, & Meilina, 2023). Dalam konteks global, desentralisasi bertujuan untuk mendekatkan pengambilan keputusan ke tingkat lokal, sehingga memungkinkan masyarakat untuk lebih berpartisipasi dalam proses pemerintahan. Di Hindia Belanda, desentralisasi administratif mulai diperkenalkan pada awal abad ke-20 melalui pembentukan Locale Raad (Dewan Lokal). Kebijakan ini dirancang untuk memberikan otonomi terbatas kepada daerah, namun tetap dalam kendali pemerintah pusat (Basundoro, 2018) (Bida, 2021). Dalam wilayah Maluku Tenggara, desentralisasi memiliki peran yang unik karena tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme administratif, tetapi juga sebagai alat untuk membangun identitas regional di tengah dinamika politik kolonial.

Kebijakan desentralisasi di Sulawesi Tenggara bertujuan meningkatkan kualitas dan pemerataan pendidikan, namun menghadapi tantangan signifikan. Disparitas pendidikan terlihat dari rendahnya Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD (33,95%) dan tingginya angka putus sekolah (0,30%), melebihi rata-rata nasional. Faktor geografis kepulauan, keterbatasan infrastruktur, dan pengaruh politik lokal memperburuk kesenjangan pendidikan. Pendekatan yang lebih memprioritaskan daerah sentra turut memperbesar disparitas antarwilayah. Upaya pemerintah melalui program afirmasi dan beasiswa belum efektif karena tantangan struktural tersebut. Diperlukan strategi komprehensif untuk memastikan pemerataan akses pendidikan berkualitas di seluruh wilayah (Lahagu, Kustiawan, & Adhicandra, 2024)(Bida, 2021).

Faktor-faktor yang memengaruhi munculnya permasalahan desentralisasi di Maluku Tenggara dapat ditelusuri melalui berbagai aspek (Laimeheriwa & Wargadinata,

2020). Pertama, kondisi geografis wilayah ini yang terdiri dari pulau-pulau kecil menyebabkan kesulitan dalam hal logistik dan distribusi sumber daya. Kedua, kebijakan kolonial yang cenderung diskriminatif menciptakan ketimpangan dalam pengalokasian anggaran dan sumber daya antara pusat dan daerah. Ketiga, keterbatasan sumber daya manusia lokal menghambat efektivitas pelaksanaan kebijakan otonomi di tingkat daerah. Keempat, ketegangan sosial yang dipicu oleh perbedaan etnis dan budaya sering kali memicu konflik dalam pengelolaan pemerintahan lokal (Ardeansari, 2022)(Zulfa Saumia, 2023).

Dampak dari faktor-faktor tersebut sangat kompleks dan luas (Alimi & Nurwati, 2021). Kesenjangan pembangunan menjadi salah satu isu utama, di mana wilayah-wilayah terpencil seperti Kepulauan Kei tertinggal dalam hal infrastruktur dan akses terhadap layanan dasar (Waris, Gusty, Safar, Rustam, & Susanto, 2023). Minimnya partisipasi lokal dalam proses pengambilan keputusan juga menjadi masalah yang signifikan, karena masyarakat merasa diabaikan dalam penentuan arah kebijakan yang memengaruhi kehidupan mereka. Di sisi lain, ketimpangan ini mendorong munculnya gerakan identitas regional, seperti yang tercermin dalam Mosi Rakyat Kei pada tahun 1947, yang menuntut pengakuan terhadap identitas dan hak-hak masyarakat lokal.

Keterkaitan antara kebijakan kolonial dan dinamika lokal di Maluku Tenggara (Gaspersz, 2022) (Laimheheriwa & Wargadinata, 2020). kebaruan penelitian ini terletak pada pendekatan integratif yang menggabungkan analisis sejarah dan sosial-budaya untuk memahami dampak desentralisasi di Maluku Tenggara. Berbeda dari studi sebelumnya yang hanya berfokus pada aspek administratif, penelitian ini menyoroti bagaimana kebijakan desentralisasi turut membentuk identitas sosial dan budaya masyarakat lokal. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya memberikan kontribusi akademis, tetapi juga relevan dalam konteks kebijakan desentralisasi di Indonesia saat ini.

Penelitian ini memiliki urgensi yang tinggi karena desentralisasi masih menjadi isu penting dalam pembangunan daerah di Indonesia. Dengan mempelajari sejarah desentralisasi di Maluku Tenggara, kita dapat memperoleh wawasan yang lebih dalam mengenai faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan dan kendala implementasi kebijakan ini. Selain itu, penelitian ini juga membantu melestarikan warisan budaya dan sejarah lokal yang sering kali terabaikan dalam perencanaan pembangunan.

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis dampak desentralisasi pada struktur pemerintahan lokal di Maluku Tenggara, mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan dan kendala dalam implementasi kebijakan ini, serta mengeksplorasi peran desentralisasi dalam membentuk identitas sosial dan budaya masyarakat lokal. Penelitian ini juga bertujuan untuk memberikan rekomendasi bagi pengembangan kebijakan desentralisasi yang lebih efektif dan inklusif di masa depan.

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat dalam berbagai aspek. Secara akademis, penelitian ini menambah literatur tentang sejarah desentralisasi di Indonesia dan hubungan antara administrasi kolonial dengan identitas lokal. Secara praktis,

penelitian ini memberikan masukan bagi pembuat kebijakan untuk merancang strategi desentralisasi yang lebih inklusif, terutama untuk wilayah terpencil. Secara sosial, penelitian ini dapat meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya peran mereka dalam pembangunan daerah. Secara budaya, penelitian ini melestarikan nilai-nilai sejarah dan budaya lokal yang menjadi bagian penting dari identitas Maluku Tenggara.

Metode

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif dan heuristik. Pendekatan deskriptif digunakan untuk memberikan gambaran mendalam mengenai fenomena yang diteliti, sedangkan pendekatan heuristik memungkinkan peneliti mengeksplorasi berbagai kemungkinan solusi dengan melibatkan proses iteratif dan reflektif guna menemukan pola-pola baru yang relevan. Penelitian ini dilaksanakan di Maluku, mencakup aspek sosial, ekonomi, dan budaya yang saling terkait untuk mendapatkan pemahaman holistik. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan analisis dokumen, yang dirancang untuk menggali informasi secara mendalam. Instrumen penelitian disusun secara sistematis guna memastikan validitas dan reliabilitas data, sementara analisis data dilakukan menggunakan pendekatan tematik untuk mengidentifikasi pola dan hubungan antar-temuan. Melalui strategi ini, penelitian diharapkan dapat menawarkan solusi yang relevan terhadap permasalahan yang ada meskipun terdapat keterbatasan, seperti akses data tertentu yang diatasi dengan upaya mitigasi berbasis pendekatan heuristik yang adaptif.

Hasil dan Pembahasan

Masa Pendudukan Belanda

Setelah VOC bangkrut pada 31 Desember 1799, selain membiayai perang (Perang Padri, Diponegoro dan lain-lain), korupsi, serta persaingan dagang dengan Inggris (*East India Company* (EIC) (Saprudin & IP, 2024) (Kebudayaan, 2017). Kejadian itu membuat Belanda menyadari bahwa penyebab utama adalah sistem pemerintahan yang tidak tepat, maka dalam perkembangan muncul tuntutan desentralisasi dimulai pada 1854. Meliputi sektor keuangan (1903), pemerintahan daerah baru (1922). Undang - undang Perubahan tahun 1922, Hindia Belanda dibagi dalam Provinsi dan Wilayah (*gewest*).

Desentralisasi di inisiasi oleh Menteri Daerah Jajahan W.K. Baron van Dedem van Vosbergen pada 1893. Meskipun UU-nya sendiri baru terwujud pada masa Menteri Daerah Jajahan Alexander Frederik Indenburg. Tujuannya untuk meningkatkan kewenangan pemerintahan pusat dan daerah di Hindia Belanda. Pada 1903 diberlakukan Undang-undang Desentralisasi dan dibentuklah Dewan lokal yang memiliki hak otonomi (*Locale Raad*). Berupa cikal bakal terbentuknya lahirnya Dewan Rakyat (*Volksraad*) dan menempatkan pribumi yang kompeten. Fungsinya adalah:

1. Membahas dan menyetujui anggaran belanja.
2. Mengatur kebijakan pemerintahan.

3. Mengawasi kegiatan pemerintah.

Sistem Pemerintahan Hindia Belanda

Keadaan pemerintah di Maluku di tandai dengan tiga *gouvernement* yang dibangun oleh VOC sejak awal abad XVII yaitu:

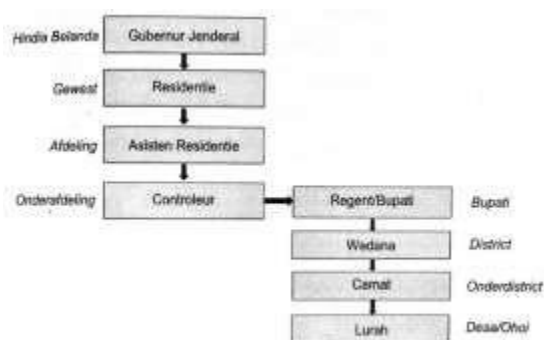
1. *Gouvernement de Molukken*
2. *Gouvernement van Amboina*.
3. *Gouvernement van Banda*

Menurut Regerings Reglement (RR) 1954, Netherland-Indie (Hindia Belanda) pemerintahan diperintah oleh Gubernur Jenderal atas nama Raja/Ratu Nederland secara sentralistis (Setitit, 2021). Daerah Nederlands-Indie dibagi dalam dua katagori besar, yaitu daerah Indirect Gebeid dan Direct Gebeid. Daerah Indirect Gebeid adalah daerah yang diperintah secara tidak langsung oleh penguasa Batavia. Daerah ini biasanya berbentuk kerajaan atau kesultanan yang terikat dengan perjanjian politik, baik jangka panjang maupun jangka pendek.

Daerah *Direct Gebeid* adalah wilayah yang diperintah secara langsung oleh Batavia secara hirarkis. Pemerintahannya bersifat administratif atau sering disebut *Inlandsch Bestuur* ("pemerintahan pangreh praja").

Pada permulaan abad XIX, ketiga *Gouvernement* di Maluku (Utara, Tengah dan Selatan) tersebut disatukan menjadi *Gouvernement der Molukken*, yang dibagi dalam dua keresidenan yaitu Keresidenan Amboina dan Keresidenan Ternate. Masing masing keresidenan diperintah oleh seorang Residen. Keresidenan Ternate membawahi 12 *afdeeling*. Keresidenan Amboina membawahi 15 *afdeeling*.

Gambar sistim struktur pemerintahan Hindia Belanda



Sumber: Suryaningrat, 1981:52

Afdeeling Toeal menjadi salah satu dibawah Keresidenan Ambon, di jabat oleh Asisten Residen yang membawahi:

1. Onderafdeeling Kei-eilanden – Toeal

2. Onderafdeeling Aroe-einlanden – Dobo
3. Onderafdeeling Tanimbar- einlanden - Saumlaki
4. Onderafdeeling Zuid-Wester einlanden
5. Onderafdeeling Boven Digoel
6. Onderafdeeling Zuid-Nieuw Guinea - Merauke

Itu penyebab Jabatan tersebut rata-rata hanya mampu di emban oleh orang Eropa atau Belanda. Struktur ini untuk memudahkan Belanda dalam mengontrol pemerintahan dengan tujuan memungut pajak dari pribumi, membangun infrastruktur guna mengangkut hasil bumi (*Cultuurstelsel* - tanam paksa, kerja paksa dll).

Afdeeling Tual dipimpin oleh Asisten Residen (berkebangsaan Belanda) sementara *Onderafdeeling Kei eilanden* dipimpin oleh Controlir. Dalam hal kebutuhan karena keterbatasan personel, seorang Controlir selain menjalankan fungsi *Onderafdeling*, dapat juga rangkap jabat, Wakil Hakim Negara Pidana, didaerah yang belum mempunyai perwakilan hukum. Dan dapat menempati di Kantor Pengadilan Lokal (*Hof van Plaatselijk*), tergantung wilayahnya. Pada di gambar diatas (struktur pemerintahan Hindia Belanda), didasari oleh dua isme pemikiran. Pertama adalah *Homo Economicus* dasar pemikiran modern secara rasional (eropa) dan kedua *Homo Socius*, berpikir secara sosial masyarakat pribumi (adat, budaya dan agama). Pemikiran tersebut mempengaruhi penempatan para pejabat yang menduduki posisi tersebut.

Pribumi biasanya menduduki posisi mulai dari Regent - District, Onderdistrict hingga Ohoi. Sementara posisi Gubernur Jenderal hingga controleur diisi dengan orang Belanda/Eropa. Posisi Controlir adalah jabatan yang menjembatani dua pemahaman tersebut, untuk itu ia dibekali pengetahuan seperti:

1. *Aardrijkskunde* - Geografi,
2. *Adatrecht* - Adat,
3. *Instellingen van de Islam* - Agama Islam,
4. *Maleishche Taal* - Bahasa Melayu,
5. *Rechtsindeling* - Yudisial,
6. *Staatstrecht van Nederlandsch Indie* - Hukum Hindia Belanda,
7. *Staatsnoodrecht van Volkenrechtelijke Verhoudingen* - Hubungan negara adidaya dan Hukum Internasional,
8. *Strafecht en Strafprocesrecht* - Hukum Pidana dan Hukum Acara Pidana,
9. *Tropische Economie* - Ekonomi Tropis.

Wilayah Maluku pada zaman Pemerintahan Hindia Belanda, Gubernur Jenderal Hindia Belanda menetapkan keputusan 19 Agustus 1923 Nomor 1 tentang penghapusan Keresidenan Nieuw Guinea dan penggabungannya ke dalam wilayah Keresidenan Ambon. Peraturan ini mulai diberlakukan pada 1 April 1924.

Dampak peraturan ini, pada 1934 *Onderafdeeling Boven Digul* dan *Onderafdeeling New Guinea Selatan* ditempatkan dibawah *Afdeeling Toel*. Dengan

pertimbangan wilayah *afdeeling toel* yang terlalu kecil menjadi alasan penyatuan kedua *onderafdeeling* ke wilayah *Afdeeling Toel*. Menurut Residen Maluku (B.J Haga) saat itu hubungan yang baik telah terjalin antara misi ordo Hati Kudus yang berkarya di *onderafdeeling* dengan Vikariat Apostolik yang tinggal di Tual. "Bahwa pembagian administratif wilayah pemerin- tahan tersebut adalah yang terbaik dengan missionaris" (Haga, (n.d.): 41).

Sebelum tahun 1945, gelar Bupati (bahasa Belanda *regent*) sebenarnya hanya dipakai di Pulau Jawa, Madura dan Bali. Semenjak kemerdekaan, istilah bupati dipakai untuk menggantikan *regent* di seluruh wilayah Indonesia. Zaman Pendudukan Jepang 1942 - 1945 Pada zaman pendudukan Jepang, daerah Maluku merupakan salah satu dari keempat wilayah pemerintahan, dengan berpusat di Kota Makassar, dan dipimpin oleh seorang Gubernur Militer Daerah Indonesia Timur berada langsung di bawah Komando Angkatan Laut Jepang (*Kaigun*). Gugus Tugas Angkatan Laut Kekaisaran Jepang (*Imperial Japanese Navy, IJN*) untuk invasi ke Ambon, dipimpin oleh Laksamana Muda Ibo Takahashi. Kekuatan armada mereka terdiri dari kapal induk Hiryu dan Soryu, kapal penjelajah berat Nachi dan Haguro, kapal penjelajah ringan Jintsu, 15 kapal perusak, 2 seaplane tender, 4 kapal penyapu ranjau, 4 kapal anti kapal selam dan 2 kapal patroli.

Pada 14 Desember 1941, Belanda dan Australia mendatangkan pasukan Sekutu ke Ambon dalam sebuah konvoi kapal laut. Konvoi ini terdiri dari kapal pengawal HMAS Adelaide dan HMAS Ballarat, serta kapal Belanda Both, Valentijn, dan Patras. Kapal-kapal tersebut mengangkut sekitar 1.000 hingga 1.090 tentara 'Gull Force' (kode sandi Sekutu) yang berangkat dari Darwin dan tiba di Ambon pada 17 Desember 1941.

Pasukan Dai Nippon, menduduki pulau Ambon pada 30 Januari 1942, pertempuran besar terjadi selama 3 hari, yang menelan korban banyak dari pihak Belanda dan Australia. Belanda dan sekutu kalah dalam pertempuran tersebut.

Pada 8 Maret 1942, Belanda secara resmi menyerah tanpa syarat kepada Jepang dan sejak itu Jepang resmi berkuasa di Indonesia, di tandai dengan perjanjian Kali Jati antara Jepang dengan Belanda, bertempat di rumah dinas seorang perwira staf Sekolah Penerbangan Hindia Belanda dikawasan landasan udara Kali Jati Subang, Jawa.

Ditandai dengan kekalahan, mereka melarikan diri ke Australia, maka pemerintahan Hindia Belanda pun bubar digantikan oleh Jepang. Untuk wilayah Papua pemerintahan Hindia Belanda di Papua tetap berjalan dan di kendalikan langsung dari Melbourne-Australia (*de Nederlandsch Indische Commissie voor Australie en Nieuw Zeeland te Melbourne*.)

Di Kepulauan Kei, pasukan Jepang masuk melalui pelabuhan Tual pada 30 Juli 1942. Pasukan dibawah komando Sersan Taro Horiba, sekitar pukul 05.30 pagi berhasil menduduki Kepulauan Kei tanpa perlawanan, karena Belanda sudah saat itu sudah melarikan di ke Australia. Saat itu para misionaris berkebangsaan asing menjadi sasaran, mereka dibunuh karena dianggap sebagai antek Belanda dan dituduh menyimpan senjata dan amunisi. Seluruh korban terdiri dari 15 orang termasuk Mgr. Johannes Aerts. MSC.

Situasi di Indonesia Timur Pasca Kemerdekaan 1945 - 1950

Pihak Sekutu untuk kawasan Asia Pasifik dalam perang dunia kedua yang terdiri dari Amerika, Australia, Inggris dan Belanda. Markas pemerintahan yang dibentuk untuk memimpin operasi-operasi Bersekutu di Asia Tenggara, *South Asia Command. (SEAC)*. Pada Mei 1945 Australia mendarat di Kalimantan dan menduduki ladang minyak disana (Zulfa Saumia, 2023)(Cahyani, 2024). Kota Ambon, bersama pasukan sekutu, menduduki dan menguasai pada tahun 1946, pihak sekutu sesuai perjanjian bersama akan menyerahkan kembali wilayah Indonesia timur kepada Belanda. Maka pada 15 Juli 1946, pemerintah Belanda (NICA) mendapatkan kembali wilayah Indonesia timur *de jure and de facto*.

Segera setelah penyerahan ini, pemerintah NICA (Pemerintah sipil di kepala seorang militer) dipimpin oleh Gubernur Jenderal Hubertus Johannes van Mook dikenal dengan van Mook, mengadakan Konferensi Malino pada 15 Juli hingga 25 Juli 1946 di Malino, Sulawesi Selatan. Konferensi ini dihadiri oleh 39 orang dari 15 daerah dari Kalimantan (Borneo) dan Timur Besar (*De Groote Oost*) dengan tujuan membahas rencana pembentukan negara-negara bagian yang berbentuk federasi di Indonesia serta rencana pembentukan negara yang meliputi daerah-daerah di Indonesia bagian Timur. Dalam konferensi tersebut dibentuk Komisariat Umum Pemerintah (*Algemeene Regeerings- commissaris*) untuk Kalimantan dan Timur Besar yang dikepalai Dr. W. Hoven. Diangkat pula anggota luar biasa Dewan Kepala-kepala Departemen (*Raad van Departementshoeden*) untuk urusan kenegaraan adalah Sukawati (Bali), Najamuddin (Sulawesi Selatan), Dengah (Minahasa), Tahya (Maluku Selatan) Dr. Liem Tjae Le (Bangka, Belitung, Riau) dan Oeray Saleh (Kalimantan Barat), yang disebut dengan "Komisi Tujuh". Peraturan pembentukan negara-negara bagian diputuskan dalam konferensi berikutnya di Denpasar, Bali.

Konferensi Denpasar diselenggarakan pada tanggal 7-24 Desember 1946 di Bali Hotel, Denpasar dan berdiri Negara Indonesia Timur, bagian dari Republik Indonesia Serikat. Pada konferensi inilah pemerintah Belanda menyatakan posisinya bahwa kendali atas Nugini Barat tidak akan diserahkan pada saat yang sama dengan wilayah Hindia Belanda lainnya. Sementara Perjanjian Linggarjati berlangsung mulai 15 November hingga 15 Desember 1946, dengan hasil perundingan:

1. Pengakuan Belanda atas kedaulatan Indonesia.
2. Pembentukan Republik Indonesia Serikat (RIS).
3. Pembagian wilayah Indonesia menjadi 16 negara bagian.
4. Pembentukan pemerintah federal.
5. Belanda menarik pasukannya dari Jawa, Sumatera dan Madura.

Hal tersebut jelas terlihat bahwa Hindia Belanda tetap berkuasa di wilayah Timur dengan di ciptakan NIT secara politis (negara tanpa kuasa) karena prakteknya Belanda berkuasa dan tetap menjalankan pemerintahan. (*Grote Oost*)

Banyak kaum nasionalis Maluku yang mencermati jalannya proses-proses politik yang dilakukan oleh pemerintah Belanda dan Republik Indonesia. Reaksi yang muncul di Ambon terhadap proses perjanjian Linggarjati dari para kaum nasionalis terutama Partai Indonesia Merdeka (PIM) yang dimuat dalam surat kabar Negara Baru tanggal 24 Pebruari 1947 bahwa; "Ambon setuju dengan Negara Indonesia Timur tetapi menentang terpisah dari Republik Indonesia." (*Koran Mingguan Negara Baroe, 24 Pebruari 1947*). Dari sumber tersebut menunjukkan bahwa selama perundingan linggarjati berjalan, telah ada rencana dari van Mook untuk mendirikan negara- negara bagian termasuk Indonesia Timur sehingga reaksi yang timbul di Maluku terhadap rencana pembentukan Negara Indonesia Timur ditanggapi oleh kaum nasionalis di Kota Ambon dengan sikap hati-hati dan diikuti secara cermat.

Rapat Umum di Ambon

Pada tanggal 16 Pebruari 1947 Partai Indonesia Merdeka di Ambon telah mengadakan suatu rapat umum yang dihadiri kurang lebih 500 orang pengurus, termasuk cabang-cabangnya diseluruh negeri dan para anggotanya (Ni'am & Mahbub, 2020). Dalam rapat tersebut dibicarakan persetujuan Linggarjati secara detail dan peserta rapat setuju dengan rencana pembentukan Negara Indonesia Timur tetapi mereka menentang dengan keras kalau Maluku dipisahkan dari Republik Indonesia. Pimpinan Partai Indonesia Merdeka E. U. Pupella mengatakan dalam rapat tersebut bahwa satu hari sebelum rapat dilaksanakan yaitu pada tanggal 15 Pebruari 1947 telah diadakan rapat anggota dan 75% dari anggota menyatakan untuk tetap berada dalam lingkungan negara Republik Indonesia. (*Koran Mingguan Negara Baroe, 24 Pebruari 1947*).

Mosi Seram Barat

Di kota Piru Seram Barat pada tanggal 2 April 1947 telah dilangsungkan suatu rapat untuk membicarakan hasil dari konferensi Linggarjati yang diikuti oleh wakil-wakil dari seluruh lapisan masyarakat dan terutama para raja yang berasal dari seluruh negeri-negeri di wilayah onder afdeling. Turut hadir dalam pertemuan itu pimpinan onderafdeling Seram Barat, Controlir tuan Bartsra yang menjelaskan tentang persetujuan Linggarjati kepada peserta rapat dan mereka setuju dengan pembentukan Negara Indonesia Timur tetapi tetap berada dalam Republik Indonesia (Negara Baroe, 3 April 1947). Dia juga menulis bahwa Dewan Maluku Selatan (*Zuid Molukken Raad*) pada tanggal 31 Maret 1947 dalam suatu persidangan dari Dewan Maluku Selatan di Amboina yang dipimpin oleh Residen Pissers, ia telah mengumumkan kepada anggota- anggota Dewan Maluku Selatan tentang penerimaan persetujuan Linggarjati di Batavia oleh pihak Republik Indonesia.

Setelah selesai sidang dilanjutkan dengan pertemuan istimewa yang dihadiri oleh seluruh raja-raja dan pembesar marine dan tentara. Residen berpidato dengan menggunakan bahasa Belanda dan Indonesia mengenai persetujuan Linggarjati dalam pertemuan istimewa itu (*Negara Baroe, 3 April 1947*).

Dalam surat kabar Negara Baroe, harian untuk Negara Indonesia Timur tanggal 8 Pebruari 1947 dijelaskan bahwa; pada konferensi Linggarjati diperoleh kesepakatan antara pihak Republik Indonesia dengan pemerintah Belanda yang sama-sama mengakui adanya Negara Indonesia Serikat yang meliputi Negara Indonesia Timur, Kalimantan, Jawa dan Sumatera. Dijelaskan pula bahwa dalam dua tahun Negara Indonesia Serikat sudah harus terbentuk dengan susunan pemerintahan sendiri dan kemudian harus mengadakan kerjasama dengan kerajaan Nederland yang akan disebut “Uni Indonesia Belanda”

Mosi Rakyat Kei

Lahirnya Maluku Ter Selatan

Di wilayah Maluku Selatan, hal yang sama sekelompok berasal dari Kepulauan Kei, Aru, Tanimbar dan Selatan Daya. Pada hari Sabtu, 26 Juli 1947, pukul 15.00 dalam rapat umum dihadiri kurang lebih 60 utusan dari berapa wilayah serumpun. Persatuan yang mengikat kelompok ini didasari oleh adat, tradisi, kesenian, bahasa dan budaya. Mereka menyatakan pendapat dengan pertimbangan bahwa melihat perkembangan kelanjutan dari kesepakatan Linggarjati, Mukhtar Denpasar dan Pidato PJM Menteri Dalam Negeri 28 April 1947. Mengatakan daerah mereka sebagai Maluku Terselatan.

Melihat juga bahwa letak geografis Maluku Ter Selatan (Tenggara) jaraknya sangat jauh dari Ambon. Serta menghendaki wilayah daerah Maluku Selatan dibagi dalam dua wilayah pemerintahan. Ditambah pula dengan perlakuan masyarakat Ambon yang selalu menomor dua kan orang Kei, hal ini yang menjadi dasar kesepakatan. Termasuk juga perwakilan yang ditunjuk, yang duduk di Badan Perwakilan Rakyat - *Volkraad* pada Dewan Maluku Selatan - DMS (*Zuid Molukken Raad*) perwakilan tersebut didominasi oleh Ambon. (mosi, bab memperhatikan ayat 2.)

Menyatakan Maluku Ter Selatan, rumpun baru menjadi Residen sendiri dalam lingkungan N.I.T (NKRI belum terbentuk).

Saat itu, *afdeeling Toel* wilayahnya, sangat lah luas hingga meliputi wilayah Papua, sehingga menyulitkan mengatur agar dapat keluar dari kemiskinan.

Tujuannya mosi ini adalah untuk percepatan pembangunan dan memajukan daerah itu sendiri dari ketertinggalan.

Mosi dibacakan pada 26 Juli 1947, dan di tanda tangani mengatasmakan Rakyat Kei:

1. A. Koedoeboen.
2. Renuat A.
3. V. Rahael
4. B. Setitit

Selang beberapa lama setelah itu, B. Setitit (Bonaventura) mengibarkan Merah Putih di halaman kantornya, dimana pada saat, ia menjabat sebagai *Controleur Saumlaki* dan anggota Dewan Maluku Selatan - DMS (*Zuid Molukken Raad*) diangkat sejak 19 November 1946, berpangkat Letnan Satu. (*lihat Bon Setitit, dalam karyanya, hal 9*)

Pasca Konferensi Meja Bundar. Penyerahan kedaulatan dari pemerintah Belanda pada Republik Indonesia terjadi 30 Desember 1949, mewakili RI diwakili oleh Mohammad Hata dan saat itu Negara Indonesia Timur ada pada kelompok *Bijeenkomst voor Federal Overleg* (BFO) Majelis Permusyawaratan Federal, yang dipimpin oleh Sultan Hamid II. Dalam perjalanan para menteri NIT terjadi perbedaan pendapat, beberapa orang menyatakan keluar dan mendeklarasi pendirian Republik Maluku Selatan (RMS), pemberontakan ini diproklamkan pada 25 April 1950 di kota Ambon. Tokoh utama adalah Dr. Christiaan Robert Steven Soumokil mantan jaksa agung NIT. Pemberontakan ini dapat dikalahkan oleh Republik.

Pada 17 Agustus 1950, NIT menyatakan bergabung dengan Republik Indonesia yang di tandai awal berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Gubernur Provinsi Maluku Y. Latuharhary awalnya diangkat sejak kemerdekaan 1945 berkantor di Yogyakarta, tidak berfungsi. Bahkan sebenarnya pada kesepakatan Linggarjati, dengan terbentuknya Republik Indonesia Serikat, dan Negara Indonesia Timur, posisi Gubernur Maluku di hapus pada Juli 1947, baru setelah penyerahan kedaulatan, provinsi Maluku di diberdayakan kembali. Pada tahun 1948, baru setelah Mosi Rakyat Kei, di Dewan *Volksraad Molukken*, Anggota Dewan Maluku Selatan (DMS) (*Zuid Molukken Raad*) yang mewakili Maluku Ter Selatan menjadi:

1. Abraham Koedoeboen (dari Kei Besar)
2. Viasentius Rahail (dari Kei Besar)
3. Hi. Abdul Gani Renuat (dari Kei Kecil)
4. Bon Setitit / Pastor Yamco (dari Kei Kecil)
5. Christian Barends (dari Kep. Aru)
6. Abdullah Solisa / Adjid Latucosina (dari Kep. Tanimbar)
7. Daniel Teurupun (dari Kep. Barbar)
8. Yacob Norimarna (dari Kep. Kisar)

Pada bulan April 1951 seluruh Anggota DMS termasuk Kelompok 8 DMS dari Maluku Tenggara di undang ke Ambon untuk mengadakan Sidang membahas masalah – masalah aktual yang terjadi. Tetapi karena kondisi saat itu tidak memungkinkan maka sidang di batalkan dan diselenggarakannya suatu rapat mendadak oleh Gubernur Maluku yang dihadiri Staf Gubernur, Anggota DMS dan lain-lain, diantaranya 8 Anggota dari Maluku Tenggara yaitu :

1. Abraham Koedoeboen (dari Kep. Kei)
2. Hi. Abdul Gani Renuat (dari Kep. Kei)
3. Rakib Nukuhehe (dari Kep. Aru)
4. Vitalis Futwembun (dari Kep. Tanimbar)

5. Simon Poeroe (dari Kep. Kisar)

Dalam rapat tersebut Gubernur Maluku Y. Latuharhary mengemukakan likuidasi/Pembubaran Daerah Maluku Selatan (*Zuid Molukken Raad*) termasuk alat kelengkapannya seperti DMS.

Resolusi:

Pada Mei 1951, sekelompok orang mewakili Maluku Terselatan, mengeluarkan resolusi. Dalam resolusi dinyatakan kriteria calon pemimpin yang akan ditempatkan di Maluku Tenggara dan menyebutkan nama Bitek Sutan Chaniago (Minangkabau) yang saat itu bekerja di kantor Gubernur Maluku di Ambon untuk menjabat sebagai Bupati Maluku Tenggara.

Penandatanganan Resolusi adalah:

1. A. Koedoeboen,
2. H.A. Gani Renuat,
3. R.S. Tugur dan
4. S. Poeroe,

Resolusi tersebut ditujukan kepada Gubernur Maluku, Presiden RI, Wakil Presiden RI dan Menteri Urusan Dalam Negeri RI. Kemudian dalam perundingan, dalam hal ini Gubernur menunjuk Abraham Koedoeboen sebagai Koordinator Perundingan dari Kelompok 8 DMS (*Zuid Molukken Raad*). Konsultasi/perundingan dengan Gubernur Maluku dan langsung secara berkala sampai dengan bulan Oktober 1951.

Kunjungan pertama Presiden Soekarno ke Tual - Kepulauan Kei.

Setelah Republik Indonesia dapat menumpaskan pemberontakan RMS, situasi kondusif kembali. Hingga pada 15 November 1951, Presiden Soekarno mengadakan kunjungan ke wilayah- wilayah Indonesia Timur, yang sebelumnya merupakan wilayah NIT, selama sebelas hari berturut-turut.

Daerah tersebut meliputi Makassar (11-12 Nov) Ambon, Piru dan Saparua (12-15 Nov); Bandaneira dan Tual (15-16 Nov); Manado (16-17 Nov); Ternate (17-20 Nov); Tondano (20 Nov); Gorontalo (20-21 Nov) dan Posso (21-22 Nov).

Dalam kunjungan tersebut Presiden di dampingi dengan, Direktur Kabinet Presiden Mr. Pringgodigdo, S Paku Alam, Kolonel Bambang Sugeng, Gubernur Jawa Timur Samadikun dan Sekjen Kementerian Penerangan Ruslan Abdulgani. Presiden dan rombongan tiba di Tual pada sore hari dengan menggunakan pesawat amfibi "Catalian" yang memungkinkan pendaratan diatas air. Tampak Mgr. Jacobus Grent MSC. (Vikariat Apostolik Amboina - Tual) menemani penerimaan rombongan kenegaraan tersebut.

Penyambutan yang sangat meriah dari masyarakat karena itu merupakan kunjungan pertama Presiden RI ke wilayah tersebut. Ribuan penduduk memekikkan kata "Merdeka" sambil mengangkat kepalan tangan. Ketika itu beberapa acara sudah diagendakan termasuk rapat umum, tetapi sayang terpaksa dibatalkan karena kondisi

kesehatan Presiden (flu) tidak memungkinkan, dan digantikan dengan Sekjen Kementerian Penerangan Ruslan Abdulgani dalam berorasi. Keesokan hari, 16 November 1951, rombongan kenegaraan melanjutkan perjalanan menuju Manado dan transit melalui kota Ambon. Kunjungan Presiden hanya meyakinkan wilayah Indonesia Timur pasca penyerahan kedaulatan dan pemberontakan RMS dalam keadaan kondusif, agar sesegera mungkin membentuk pemerintahan agar dapat berjalan.

Gubernur Maluku mengunjungi Tual - Kepulauan Kei.

Sebagai tindak lanjut kunjungan Presiden Soekarno sebulan setelah itu, pada 10 Desember 1951 Gubernur Maluku Y. Latuharhary mengunjungi wilayah Maluku Tenggara. Diatas geladak kapal KM Kasimbar yang berlabuh di dermaga Tual, ia mengadakan perundingan dengan tokoh tokoh masyarakat setempat, di antaranya:

1. Abraham Koedoeboen,
2. Muhidin Madubun,
3. Ambarak Renwarin,
4. Hi Abdul Gani Renuat.
5. Ph Renyaan,
6. Piet Tethool,
7. Simon Poroew,
8. M Moses. Vitalis Futwembun dan
9. J. Bonara.

Saat itu dikatakan ada tiga kendala serius yang dihadapi Maluku Ter Selatan yaitu:

1. Belum banyak tenaga intelektual yang dapat diandalkan untuk menyelenggarakan pemerintahan.
2. Terbatasnya sumber daya dan/atau hasil bumi di daerah tersebut untuk dapat membelanjai suatu daerah otonom.
3. Jika Tual ditetapkan sebagai ibu kota, masalah besar yang dihadapi adalah tidak tersedianya sumber air bersih.

Perundingan berjalan cukup alot, walaupun sebelum penyerahan kedaulatan, Tual adalah *Afdeeling* yang membawahi *ondeafdeeling* hingga Papua, adalah satu wilayah yang sangat besar bahkan dapat dikatakan sama setingkat Provinsi. Maka akhirnya disepakati pembentukan Daerah Tingkat II Maluku Tenggara (dahulu Maluku Ter Selatan) hanya meliputi wilayah Tual, Kepulauan Kei, Kepulauan Aru, Pulau Tanimbar dan Maluku Barat Daya (Kisar dll).

Gubernur menjelaskan bahwa tuntutan Tokoh-tokoh Maluku Tenggara akan dipenuhi dengan membagi daerah Maluku Selatan dalam dua wilayah yaitu Daerah Tingkat dua Maluku Tengah dan Daerah Tingkat dua Maluku Tenggara. Tindak lanjut dari pada pertemuan itu dilaksanakan suatu pertemuan untuk menetapkan Ibu Kota Daerah tingkat dua Maluku Tenggara. Pertemuan ini kemudian menimbulkan perdebatan diantara peserta yang hadir dalam rangka penetapan Ibu Kota tersebut.

Muncul keinginan untuk menentukan Saumlaki sebagai Ibu Kota Daerah Tingkat dua Maluku Tenggara, namun keinginan ini ditolak dan menetapkan Tual sebagai Ibu Kota.

Peraturan Pemerintah No. 35 thn 1952 Maluku Terselatan menjadi Maluku Tenggara.

Pada 12 Agustus PP No. 35 tahun 1952 tentang: "Pembubaran daerah Maluku Selatan dan Pembentukan daerah Maluku Tengah dan daerah Maluku Tenggara".

Dalam penjelasan pasal 1, dengan mengingat keinginan rakyat dari pulau pulau Kei, Aru, Tanimbar, Babar dan Kisar, maka digantilah dengan nama "**Tenggara**", dan daerah tersebut dinamakan Daerah Maluku Tenggara, yang bunyinya tidak menimbulkan kompleks menurut sejarah.

Hal tersebut penting sebab:

1. Memberikan kewenangan untuk membentuk wilayah administrasi sendiri (Maluku Tenggara).
2. Mempertegas pemberontakan Republik Maluku Selatan, tidak ada kaitannya dengan Maluku Tenggara, walau saat itu dalam satu wilayah (Maluku Selatan).

Peraturan Pemerintah ini, merupakan landasan hukum pembentukan Kabupaten Maluku Tenggara.

Drs. Bonaventura Setitit, dalam karya- nya.

Hukuman

Dua puluh satu hari setelah peristiwa Mosi Rakyat Kei, pada 16 Agustus 1947, Residen Maluku (de Resident van Zuid-Molukken) mengirimkan surat keputusan hubungan kerja dengan hormat kepada Bonaventura Setitit dari jabatannya sebagai Controlir pada Administrasi Dalam Negeri Hindia Belanda, Subdivisi Kepulauan Tanimbar di Saumlaki. Ia diminta segera kembali ke Ambon untuk menghadap Residen dan memberikan pertanggungjawaban.

Surat kedua dari *Commissariat van de Kroon voor Oost Indonesie* di Makassar menegaskan keputusan Residen Ambon dan menambahkan bahwa Bonaventura juga harus memberikan pertanggungjawaban di Batavia. Namun, keputusan ini kemudian diralat, sehingga ia tetap diminta mempertanggungjawabkan tugasnya di Ambon.

Surat ketiga, tertanggal 10 September 1947, berasal dari *de Minister van Justitie van Oost-Indonesie* (Menteri Kehakiman Indonesia Timur), yang memberhentikan Bonaventura dengan hormat dari jabatannya sebagai Wakil Hakim Negara.

Ketika menghadap Residen, terjadi perdebatan panjang, tetapi keputusan tetap tidak berubah. Bonaventura Setitit diberhentikan dari jabatannya sebagai Controlir Saumlaki dan Wakil Hakim karena dianggap membahayakan. Namun, status kepegawaiannya dalam administrasi Hindia Belanda tetap dipertahankan, meskipun pangkatnya sebagai Letnan Dua tidak dibahas.

Beberapa minggu kemudian, pada awal September 1947, atas perintah Residen Ambon, ia diperintahkan untuk melanjutkan pendidikan ke Universitas Leiden dengan alasan kekurangan personel. Namun, ada maksud tersembunyi di balik perintah ini, yaitu untuk memisahkannya dari rekan-rekan seperjuangannya. Meskipun telah diberhentikan

dari jabatan, Bonaventura tetap menerima hak kenaikan gaji berkala sebagai pegawai Hindia Belanda (*Binnenlands Bestuur*), dari 275 gulden menjadi 340 gulden pada 9 Oktober 1947. Ia meninggalkan Ambon pada bulan yang sama dengan perasaan sedih karena harus berpisah dengan teman-teman seperjuangannya serta meninggalkan jabatannya sebagai Controlir, Wakil Hakim, anggota Dewan Maluku Selatan (*Zuid Molukken Raad*), anggota *Volksraad Molukken*, dan pangkat Letnan Dua-nya. Ia kemudian berlayar menuju Batavia untuk menempuh studi di Universitas Indonesia (*Universiteit van Indonesie*) selama satu tahun sebelum melanjutkan ke Belanda pada 30 Oktober 1948.

Saat tiba di Belanda, Bonaventura mengalami kendala saat hendak mendaftar sebagai mahasiswa baru. Ijazah HBS-nya belum ditandatangani oleh Menteri Pendidikan Belanda, yang merupakan syarat masuk universitas. Padahal, uang pendaftaran dan semester pertama telah dibayarkan oleh *Commissariaat voor Indische Zaken*. Akibatnya, ia tidak dapat mendaftar tahun itu dan harus menunggu hingga pendaftaran berikutnya pada November 1949.

Konferensi Meja Bundar

Atas penugasan dari Kementerian Luar Negeri Belanda (*Ministerie van Overzeese Gebiedsdelen*), Bonaventura Setitit bekerja di Sekretariat Jenderal Konferensi Meja Bundar (KMB), yang berlangsung dari 23 Agustus hingga 2 November 1949. Ia menjadi satu-satunya saksi sejarah dalam persidangan yang dihadiri oleh negara-negara peninjau seperti Amerika Serikat, Inggris, Belgia, Australia, Prancis, Republik Tiongkok, dan Uni Soviet.

Selama masa menunggu hingga pembukaan pendaftaran universitas pada November 1949, Bonaventura menerima surat dari Kementerian Luar Negeri Belanda yang menugaskannya untuk bekerja dalam penyelenggaraan Konferensi Meja Bundar. Tugas ini semakin memperkuat perannya dalam proses diplomasi yang menentukan masa depan Indonesia.

Delegasi Republik Indonesia dipimpin oleh Mohammad Hatta sebagai ketua, dengan anggota termasuk Mohammad Roem, Abdoel Karim Pringgodigdo, Soepomo, Juanda Kartawijaya, Johannes Leimena, Sukiman, Suyono Hadinoto, Sumitro Djojohadikusumo, TB Simatupang, Muwardi, dan Ali Sastroamidjojo. Sementara itu, delegasi *Bijeenkomst voor Federaal Overleg* (BFO) atau Majelis Permusyawaratan Federal dipimpin oleh Sultan Hamid II, yang anggotanya terdiri dari perwakilan Negara Indonesia Timur, Negara Jawa Timur, Negara Sumatera Timur, Negara Madura, Negara Pasundan (Jawa Barat), dan Negara Sumatera Selatan. KMB menghasilkan kesepakatan penting, termasuk pengakuan kedaulatan Republik Indonesia dan penyerahan kedaulatan oleh Belanda selambat-lambatnya pada Desember 1949.

Leiden Universiteit

Bonaventura akhirnya diterima di Rijksuniversiteit Leiden pada tahun ajaran 1949. Meskipun masa studi normalnya adalah enam tahun, dalam ikatan dinas tertulis bahwa ia harus menyelesaikannya dalam tiga tahun. Namun, ia berhasil menyelesaikan studi dalam 2,5 tahun dengan predikat *Summa Cum Laude* dan meraih gelar Dokterandus

Indologi Ekonomi (Drs.), yang pada masa itu setara dengan gelar Master/S2 dalam sistem pendidikan Belanda.

Sebagai bagian dari kesepakatan KMB, pegawai yang sedang menempuh studi di Belanda diberikan pilihan kewarganegaraan. Saat ditanya, Bonaventura menyatakan tetap memilih menjadi Warga Negara Republik Indonesia. Ia kemudian dipanggil pulang melalui surat dari *Hoge Commissariaat RI* (Komisariat Agung RI) pada 16 Mei 1952. Setelah kembali ke Indonesia, ia ditugaskan di Departemen Dalam Negeri RI, dengan masa kerja sebelumnya di Hindia Belanda dihitung selama lima tahun.

Kepala Otonomi dan Desentralisasi Kementerian Dalam Negeri RI

Pada Juni 1952, Bonaventura bekerja sesuai dengan disiplin ilmu yang diperolehnya dan menjabat sebagai Kepala Otonomi dan Desentralisasi di Kementerian Dalam Negeri dalam Kabinet Wilopo, di bawah Menteri Dalam Negeri Mohammad Roem. Jabatan tersebut setingkat Direktur Jenderal dengan golongan VI/b.

Sebagai bagian dari upaya membangun Negara Kesatuan Republik Indonesia, prioritas utama saat itu adalah pembenahan Provinsi Maluku. Salah satu kontribusi Bonaventura adalah merancang peraturan pemerintah terkait pembentukan wilayah administratif di Maluku.

Peraturan Pemerintah RI No. 35 Tahun 1952

Pada 12 Agustus 1952, diterbitkan Peraturan Pemerintah RI No. 35 Tahun 1952 tentang Pembubaran Daerah Maluku Selatan dan Pembentukan Maluku Tengah serta Maluku Tenggara. Peraturan ini merupakan buah pemikiran Bonaventura Setitit dalam upaya membangun landasan hukum bagi pembentukan Kabupaten Maluku Tenggara.

Namun, dinamika politik pada masa itu menyebabkan bidang Otonomi dan Desentralisasi dibubarkan melalui Dekrit Presiden 5 Juli 1959. Bonaventura kemudian mengundurkan diri dari Kementerian Dalam Negeri pada 23 Januari 1955.

Pada 1968, ia bergabung dengan Partai Katolik yang saat itu dipimpin oleh Drs. Frans Seda dan turut aktif dalam berbagai kegiatan, termasuk kepanitiaan penyambutan Sri Paus Paulus VI pada 1970 serta perayaan misa di Gelora Bung Karno (GBK). Ia juga berperan dalam peresmian nama Jalan Patimura di Jakarta. Cita-citanya agar Maluku Tenggara menjadi provinsi tersendiri tidak terwujud.

Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk menggali dan menganalisis secara mendalam dinamika sejarah Maluku Terselatan, khususnya dalam konteks sosial, politik, dan ekonomi, sebagai upaya memahami transformasi wilayah tersebut sepanjang masa penjajahan hingga era pasca-kemerdekaan. Temuan utama menunjukkan bahwa kebijakan kolonial, seperti desentralisasi dan penghapusan keresidenan, serta peran tokoh lokal seperti Bonaventura Setitit, memiliki dampak besar terhadap struktur sosial dan administrasi wilayah ini. Penelitian ini juga mengidentifikasi bagaimana perjuangan

politik rakyat Kei melalui mosi dan resolusi berkontribusi terhadap pembentukan wilayah Maluku Tenggara, yang menjadi salah satu contoh penting dari desentralisasi administratif di Indonesia.

Penelitian ini mengungkap bahwa desentralisasi administratif di Maluku Tenggara selama masa Hindia Belanda melalui pembentukan Locale Raad dan reorganisasi administratif dengan menjadikan Tual sebagai pusat pemerintahan lokal memiliki dampak signifikan terhadap struktur pemerintahan, dinamika sosial, dan pembentukan identitas regional. Proses desentralisasi memperkuat partisipasi lokal dalam pemerintahan, meskipun tetap berada di bawah kendali kolonial, serta membentuk sistem pemerintahan yang hierarkis dan kompleks. Kebijakan ini turut mendorong munculnya identitas wilayah yang kuat, tercermin dalam Mosi Rakyat Kei (1947), yang menuntut pengakuan administratif terpisah dari Maluku Selatan dan memperkuat semangat otonomi daerah. Namun, keberhasilan implementasi desentralisasi dihadapkan pada berbagai kendala, seperti kondisi geografis yang terfragmentasi, keterbatasan sumber daya manusia lokal, ketimpangan alokasi anggaran, dan ketegangan sosial-budaya yang memicu konflik. Meski demikian, kebijakan ini tetap menjadi fondasi penting dalam pembentukan identitas wilayah Maluku Tenggara dan memberikan pelajaran berharga dalam mengelola desentralisasi di wilayah kepulauan dengan kompleksitas sosial dan geografis yang tinggi.

Kontribusi penelitian ini terletak pada penyajian perspektif yang lebih terfokus terhadap sejarah Maluku Terselatan, memperkaya literatur yang ada dengan data spesifik mengenai peran tokoh lokal dan dinamika politik daerah. Penelitian ini menegaskan pentingnya memahami sejarah lokal dalam konteks perubahan kebijakan nasional, yang berdampak signifikan pada pembentukan identitas wilayah. Namun, penelitian ini menghadapi keterbatasan, seperti minimnya akses terhadap arsip primer dan kurangnya wawancara langsung dengan saksi sejarah, yang dapat memperkaya analisis.

Untuk penelitian mendatang, disarankan untuk menggali lebih banyak dokumen arsip kolonial dan wawancara mendalam dengan generasi penerus para tokoh lokal untuk mendapatkan data yang lebih komprehensif. Penelitian lintas disiplin yang menggabungkan pendekatan sejarah dengan antropologi sosial juga dapat memberikan wawasan baru tentang dinamika masyarakat Kei. Dengan demikian, hasil penelitian diharapkan tidak hanya memperkuat pemahaman tentang sejarah lokal tetapi juga menjadi acuan penting dalam perencanaan kebijakan pembangunan wilayah di masa depan.

Daftar Pustaka

- Alimi, Rosma, & Nurwati, Nunung. (2021). Faktor penyebab terjadinya kekerasan dalam rumah tangga terhadap perempuan. *Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat (JPPM)*, 2(1), 20–27.
- Ardeansari, Resa Sepester. (2022). *Konflik Batas Wilayah Antar Daerah (Studi*

- di Desa Sunsong Kecamatan Sekadau Hulu Kabupaten Sekadau dan Desa Bungkong Baru Kecamatan Sepauk Kabupaten Sintang). SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA STPMD" APMD".*
- Basundoro, Purnawan. (2018). *Merebut ruang kota: aksi rakyat miskin Kota Surabaya 1900-1960an*. Marjin Kiri.
- Bida, Obed. (2021). Kebijakan Desentralisasi dan Disparitas Pendidikan Lokal di Provinsi Sulawesi Tenggara. *Jurnal Ilmu Administrasi Negara ASIAN (Asosiasi Ilmuwan Administrasi Negara)*, 9(1), 228–248.
- CAHYANI, DERISA D. W. I. (2024). *TIONG HOA HWE KWAN DALAM DINAMIKA KEHIDUPAN ETNIS TIONGHOA DI BATAVIA TAHUN 1900-1942*. UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA.
- Gaspersz, Steve G. C. (2022). Islam di Kota Ambon pada Masa Kolonial: Perspektif Sejarah. *Jurnal Sundermann*, 15(2), 15–25.
- Jaelani, Abdul Kadir. (2018). Pengembangan destinasi pariwisata halal pada era otonomi luas di Provinsi Nusa Tenggara Barat. *Jurnal Khatulistiwa Informatika*, 5(1), 56–67.
- Kebudayaan, Tim Penulis Kementerian Pendidikan. (2017). *Sejarah Indonesia. Buku Siswa Kelas X, Jakarta: Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan*.
- Lahagu, Sidik Eli, Kustiawan, Bambang, & Adhicandra, Iwan. (2024). *Manajemen pendidikan: Teori & referensi komprehensif untuk pengembangan dan kemajuan pendidikan di Indonesia*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Laimeheriwa, S. H., & Wargadinata, Ella. (2020). Dinamika Pemerintahan Desa Adat Di Maluku Tenggara. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*.
- Mulia, Rizki Afri, Hariadi, Berian, & Meilina, Susiyanti. (2023). TANTANGAN DALAM PERKEMBANGAN DESENTRALISASI DI INDONESIA. *Ensiklopedia of Journal*, 5(3), 177–181.
- Ni'am, Maulana Ahsanun, & Mahbub, Moh. (2020). *Konflik Hizbullah dan PKI Tahun 1948-1950 dan Dampak Terhadap Sosial Ekonomi Pasca Konflik di Surakarta*. IAIN Surakarta.
- Saprudin, S., & IP, M. Tr. (2024). *MODEL PEMERINTAHAN; Ragam Bentuk Sistem Pemerintahan, Sejarah, Konsep, dan Strategi*. Nas Media Pustaka.
- Setitit, Stephanus G. (2021). *Sebiji dari Tenggara: Biografi Bon Setitit*. PT Kanisius.
- Waris, Milawaty, Gusty, Sri, Safar, Anriani, Rustam, Muhamad Syarif Prasetya Adiguna, & Susanto, Hery Awan. (2023). *Inovasi Pendidikan Dan Teknologi (Perspektif Kemaritiman)*. Tohar Media.
- Zulfa Saumia, Erniwati. (2023). TIONG HWA HWE KOAN (THHK): PERKUMPULAN ORANG TIONGHOA PADA MASA HINDIA BELANDA DI PADANG TIONG HWA HWE KOAN (THHK): THE CHINESE ORGANIZATION IN THE NETHERLAND INDIES PERIOD IN PADANG. *Jurnal Penelitian Sejarah Dan Budaya Vol*, 9(1).